



**BADAN  
STANDARDISASI  
NASIONAL**



**Laporan Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah**

# **DIREKTORAT PENGUATAN PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

**TAHUN ANGGARAN  
2020**



**Badan Standardisasi Nasional**



## **KATA PENGANTAR**



**Pada lembar ini, di mohon untuk mengisi Kata Pengantar untuk Laporan Kinerja 2020 dari Pimpinan Unit Kerja**



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**



**Pada lembar ini, di mohon untuk mengisi Ringkasan Eksekutif, yang memuat/menyajikan tabel capaian kinerja unit kerja dan menyajikan ringkasan upaya perbaikan berkelanjutan,**



# DAFTAR ISI

**Pada Lembar ini, dimohon menyajikan daftar isi dengan keterangan halaman**

### 1.1 LATAR BELAKANG

 Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, bahwa setiap Instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja tersebut tidak hanya di tingkat Lembaga tetapi juga unit dibawahnya. Sesuai Peraturan Kepala BSN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, maka Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menjadi salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang harus pula menyusun Laporan Kinerja yang merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan capaian kinerja BSN.

### 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mendukung Badan Standardisasi Nasional, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan bagi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

### 1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan unit kerja di bawah Kedeputusan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kebijakan internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standard dan penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Struktur organisasi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, serta penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Subdirektorat Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian; dan
- b. Seksi Partisipasi Masyarakat.

Subdirektorat Fasilitas Pelaku Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pelaku usaha dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Subdirektorat Fasilitas Pelaku Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Industri dan Organisasi Publik; dan
- b. Seksi Fasilitas Usaha Mikro Kecil.

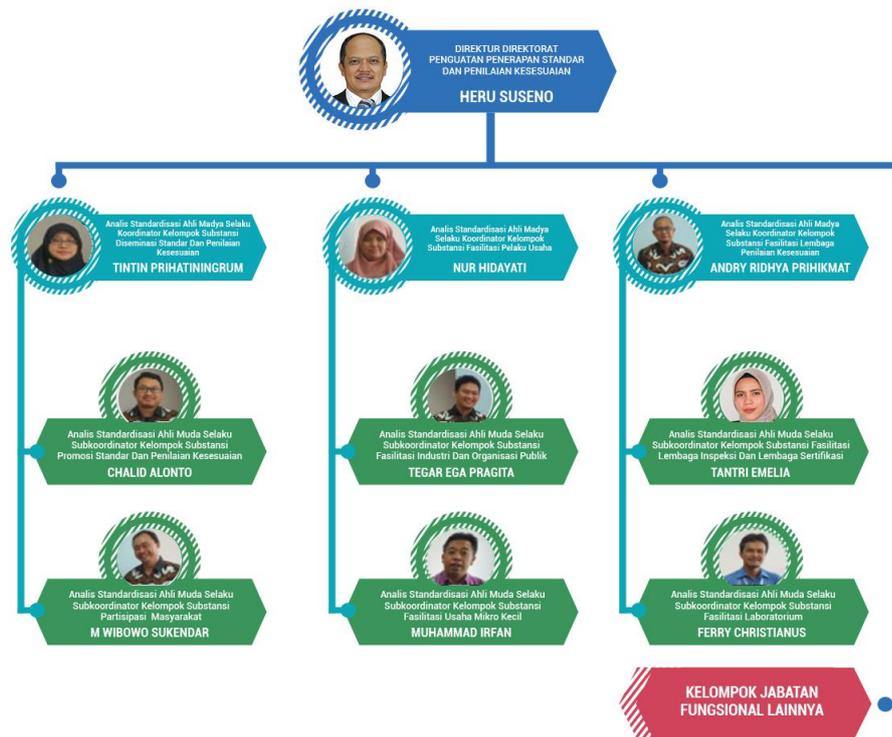
Subdirektorat Fasilitas Lembaga Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Subdirektorat Fasilitas Lembaga Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Laboratorium; dan
- b. Seksi Fasilitas Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

Dalam upaya mewujudkan debirokratisasi, BSN melakukan transformasi jabatan struktural eselon III dan eselon IV menjadi pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan. Maka ada perubahan nomenklatur jabatan dari semula kepala subdirektorat menjadi koordinator kelompok substansi dan kepala seksi menjadi subkoordinator kelompok substansi. Sehingga strukturnya berubah menjadi jabatan sebagai berikut:

1. Koordinator Kelompok Substansi Fasilitas Pelaku Usaha  
**Terdiri atas:**
  - Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Usaha Mikro Kecil
  - Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Industri Dan Organisasi Publik
2. Koordinator Kelompok Substansi Diseminasi SPK  
**Terdiri atas:**
  - Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi SPK
  - Subkoordinator Kelompok Substansi Partisipasi Masyarakat
3. Koordinator Kelompok Substansi Fasilitas LPK  
**Terdiri atas:**
  - Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi
  - Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Laboratorium

Struktur Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian**

#### 1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2020, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel I.1 Personel ASN Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	
1.	Direktur PPSPK	-	-	1	1
2.	Koordinator Kelompok Substansi Fasilitas Pelaku Usaha	-	1	-	1
3.	Koordinator Kelompok Substansi Diseminasi SPK	-	-	1	1
4.	Koordinator Kelompok Substansi Fasilitas LPK	-	-	1	1
5.	Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Usaha Mikro Kecil	-	1	-	1

6.	Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Industri Dan Organisasi Publik	-	-	1	1
7.	Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi SPK	-	1	-	1
8.	Subkoordinator Kelompok Substansi Partisipasi Masyarakat	-	1	-	1
9.	Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi	-	1	-	1
10.	Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Laboratorium	-	1	-	1
11.	Staf	2	24	2	9
Jumlah		2	30	6	38

## I.5 PERAN STRATEGIS

Sebagaimana yang mendasari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), bahwa dalam rangka melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diperlukan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Dengan harapan bahwa kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat mencapai tujuan:

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi
- b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup
- c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Peran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian bagaimana standar, terutama Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dimanfaatkan/diterapkan oleh *stakeholder* standardisasi sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut di atas.

Untuk itu, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

**Tabel I.2 Potensi dan Permasalahan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian**

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan pembinaan dalam penerapan SNI meningkat	1.1. Biaya pendampingan penerapan SNI terbatas  1.2. Keterbatasan waktu SDM Pembina penerapan SNI	1.1.1. Sinergi dengan berbagai pihak untuk membantu pembiayaan sertifikasi  1.1.2. Pendekatan kepada lembaga sertifikasi untuk memberikan keringanan biaya untuk UMKM  1.2.1. Penguatan Komitmen Pembina pelaku usaha
2. Pembina UMKM di Indonesia cukup banyak tersebar di beberapa wilayah	2.1. Masih sedikitnya pembina UMKM yang memiliki pengetahuan/ keahlian/ pengalaman dalam mendampingi UMKM dalam menerapkan SNI	2.1.1. Peningkatan kompetensi (capacity building) Pembina UMKM dalam menerapkan SNI melalui training/ magang/ e-learning, dll  2.1.2. Memperluas jaringan Pembina/ Membuat forum Fasilitator SNI  2.1.3. Memperbanyak pembina pelaku usaha khususnya di daerah
3. Produk ber-SNI yang beredar di masyarakat semakin meningkat jumlahnya	3.1. SNI belum menjadi acuan masyarakat dalam memilih sebuah produk	3.1.1. Melakukan diseminasi SPK secara luas ke berbagai segmen masyarakat melalui berbagai media dan metode komunikasi
4. Kebutuhan LPK semakin meningkat baik lingkup yang baru maupun daerah/kawasan yang belum berkembang	4.1. Masih banyaknya SNI yang belum didukung oleh LPK yang telah diakreditasi  4.2. Terbatasnya jumlah LPK di Kawasan tertentu, terutama Indonesia bagian Timur	4.1.1. Melakukan sosialisasi/ bimbingan teknis penyiapan LPK yang mendukung penerapan SNI untuk dapat diakreditasi  4.1.2. Kerjasama dengan Direktorat SPSPK dalam upaya penunjukan LPK untuk menambah ruang lingkup sesuai kebutuhan  4.2.1. Mendorong berkembangnya LPK di daerah/Kawasan yang belum

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		tersedia untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah

## II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

### II.1.1 Visi dan Misi

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (PPSPK) merupakan salah satu unit organisasi baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan BSN No. 10 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Secara struktural, PPSPK dibawah Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Visi PPSPK mengikuti visi Presiden sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang kemudian diturunkan menjadi visi BSN yang selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, yaitu :

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangasa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

## MISI

### **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

Dalam konteks penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, yang mengacu pada misi Kedeputan PSPK menjalankan misi yang difokuskan pada **Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh**, maka fokus PPSPK misi berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung penerapan standar;
2. Meningkatkan penerapan standar dan penilaian kesesuaian pada organisasi dan pelaku usaha dalam rangka penguatan daya saing nasional;
3. Mengembangkan budaya standar dan penilaian kesesuaian;

### **II.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi PPSPK telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan utama penerapan standar dan penilaian kesesuaian adalah meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI, yang dalam upaya penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**Tabel X.X Tujuan**

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	1. Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata), dengan target sd 2024 sebesar 70%.

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran PPSPK**

Tujuan	Sasaran
<b>Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produk, system, personel, jasa, dan proses yang sesuai dengan SNI</li> <li>2. Meningkatkan SNI yang diterapkan</li> <li>3. Meningkatkan minat penerapan standar dan penilaian kesesuaian</li> <li>4. Meningkatkan ketersediaan LPK</li> <li>5. Meningkatkan kualitas layanan standarisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT</li> <li>6. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran</li> </ol>

Berikut sasaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Sasaran sesuai Renstra Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 – 2024 adalah

1. Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI;
2. Diterapkannya SNI sesuai ketentuan

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2020 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Kedepujian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2020 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kedepujian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2020 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

**Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1. Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI	1. Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)	70 %
2. Tersedianya kebijakan pengembangan SPK berbasis penelitian ( <i>research-based policy</i> )	2. Jumlah kebijakan pengembangan SPK berbasis penelitian ( <i>research-based policy</i> ) (akumulatif)	310 kebijakan
3. Diterapkannya SNI sesuai ketentuan	3. Indeks penerapan SNI (akumulatif)	28
4. Diterapkannya tata kelola SPK secara menyeluruh	4. Indeks penerapan tata Kelola SPK	40
5. meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	5. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	75 nilai (BB)

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Kedepujian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 2020 menetapkan sebanyak 5 sasaran di mana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja Kedeputan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah dilakukan *cascading* Perjanjian Kinerja pada tingkat Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1. Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI	1. Jumlah produk yang memenuhi SNI	20.000 Produk
2. Diterapkannya SNI sesuai ketentuan	2. Jumlah SNI yang diterapkan (akumulatif)	2.650 SNI
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran	3. Persentase realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	≥ 97 %

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program, yaitu Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dan Kegiatan : Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang akan menghasilkan output :

<b>3558</b>	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
3558.001	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
51	Diseminasi dan Promosi SPK
52	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan organisasi
53	Bimbingan Teknis LPK
3558.004	Pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kantor Layanan Teknis
051	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya
052	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Bekasi - Cikarang
053	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau
054	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang
055	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Kedeputian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Badan Standardisasi Nasional, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	Realisasi (% dari target)
1. Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI	1. Jumlah produk yang memenuhi SNI	20.000 Produk	23.530	115
2. Diterapkannya SNI sesuai ketentuan	2. Jumlah SNI yang diterapkan (akumulatif)	2.650 SNI	3.175	119
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran	3. Persentase realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	≥ 97 %	<u>99,15</u>	<u>102</u>

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Penguatan Direktorat Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

**SASARAN 1**

**Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI**

Indikator Kinerja Sasaran 1 adalah:

**Tabel XX.XX  
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		Target	Realisasi	% *)	Target	% capaian
1. XXXXXXXXXX	XXX	1	1	100 %	1	100 %
<b>Rata-rata capaian Sasaran</b>						<b>100 %</b>

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

<b>Indikator Kinerja 1</b>	<b>Jumlah produk yang memenuhi SNI</b>	<b>Target</b> 20.000 Produk <b>Capaian</b>
----------------------------	--	---

		50.383
--	--	--------

Capaian indikator kinerja jumlah organisasi yang menerapkan SNI sebanyak 23.530 organisasi. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 20.000 organisasi (pelaku usaha). Dibandingkan dengan capaian indikator kinerja jumlah organisasi yang menerapkan SNI di tahun 2019 hanya berjumlah 19.398 organisasi.

Data capaian indikator kinerja ini berasal dari organisasi yang terdaftar menjadi klien lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN. Lembaga sertifikasi mengeluarkan sertifikat kesesuaian kepada organisasi setelah melalui proses penilaian kesesuaian terhadap kesesuaian persyaratan standar. Semakin banyak jumlah sertifikat kesesuaian yang diberikan oleh lembaga sertifikasi menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan SNI semakin meningkat.

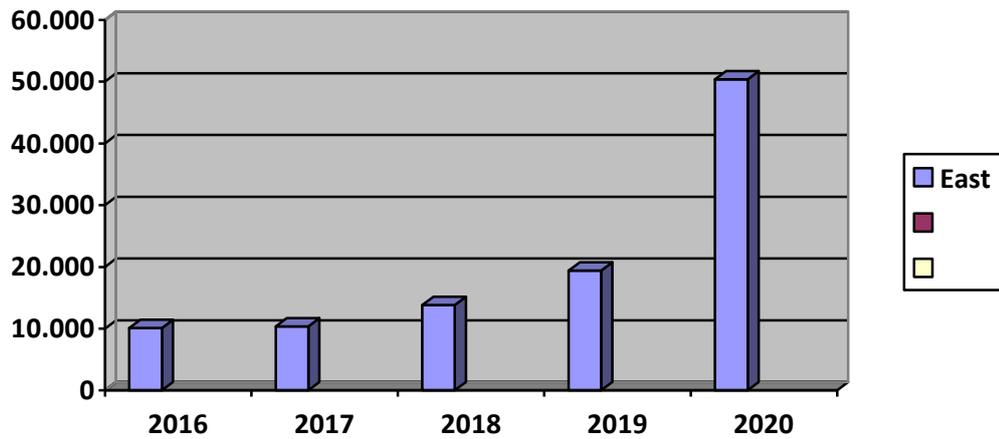
Berdasarkan Tabel..dibawah ini, terlihat bahwa sebagian besar penerap SNI dari lingkup masing-masing sertifikasi mengalami kenaikan. Hanya sertifikasi halal dan ekolabel yang mengalami penurunan, dan sertifikasi gas rumah kaca tidak mengalami kenaikan. Penerap SNI sistem manajemen mutu mengalami kenaikan sebesar 15 % (753 organisasi), penerap SNI sistem manajemen keamanan pangan mengalami kenaikan sebesar 91 % (182 organisasi), sedangkan penerap sertifikasi SHACCP mengalami kenaikan sebesar 31,5 % (54 organisasi). Demikian juga untuk penerap SNI sistem manajemen keamanan informasi 88 % (75 organisasi). Penerap SNI produk mengalami kenaikan sebesar 42 % (661 organisasi).

Untuk penerap SNI Sistem Manajemen Alat Kesehatan dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) belum secara signifikan mengalami peningkatan. Kebijakan pemerintah terkait penerapan SNI SMAP belum sepenuhnya diikuti oleh pelaku usaha baik dari sector swasta, BUMN maupun dari Pemerintah.

**Tabel III.4 Jumlah organisasi penerap SNI sesuai dengan skema akreditasi KAN**

No	Organisasi/pelaku usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penerap SNI Produk	2982	3082	1560	2221	10.345
2	Penerap standar pertanian organik	355	319	288	316	596
3	Penerap standar jaminan produk halal	-	-	3314	3270	10.300
4	Penerap standar sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14001)	438	775	650	1944	804
5	Penerap pengelolaan hutan	-	-	223	251	288

	produksi lestari					
6	Penerap standar ecolabel	7	7	9	8	9
7	Penerap standar Gas Rumah Kaca	-	-	5	5	5
8	Penerap standar system manajemen energi	-	-	6	57	35
9	Penerap standar verifikasi Legalitasi Kayu	-	-	2257	2941	3.047
10	Penerap standar system manajemen mutu (SNI ISO 9001)	5990	5691	4961	5714	4.635
11	Penerap system manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22001)	196	198	198	380	235
12	Penerap system Hazzard Analytical Critical Control Point (HACCP)	91	157	171	225	244
13	Penerap Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001)	39	113	88	163	386
14	Penerap Sistem Manajemen Alat Kesehatan	10	11	17	33	36
15	Penerap Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SNI ISO 37001)	-	-	72	96	255
16	Penerap Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SNI ISO 28001)	-	-	-	2	5
17	Penerap standar Usaha Pariwisata	-	-	-	1801	1.279
18	Penerap Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium	-	-	-	1	1
19	Penerap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	-	-	71	51
20	Penerap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh	-	-	--	-	172
21	Penerap Sistem Manajemen Keselamatan Kerja	-	-	-	-	51
	<b>TOTAL</b>	<b>10.108</b>	<b>10.353</b>	<b>13.819</b>	<b>19.398</b>	<b>50.383</b>



Gambar III.1 Pertumbuhan jumlah organisasi penerap SNI dari tahun 2016-2020

**SASARAN 2**

Diterapkannya SNI sesuai ketentuan

Berikut disampaikan rincian capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

Tabel XX.XX  
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		Target	Realisasi	% *)	Target	% capaian
2. XXXXXXXXXX	XXX	1	1	100 %	1	100 %
<b>Rata-rata capaian Sasaran</b>						<b>100 %</b>

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

<b>Indikator Kinerja 2</b>	<b>Jumlah SNI yang diterapkan (akumulatif)</b>	<b>Target</b> 2.650 SNI
		<b>Capaian</b> 3.175 SNI

Indikator ini dirumuskan sebagai jumlah SNI yang ada saat ini dibandingkan dengan jumlah SNI yang diterapkan oleh stakeholder standardisasi.

Sesuai dengan data per Desember 2019, jumlah SNI yang berlaku sebanyak 9.935 SNI. Maksud dari jumlah SNI yang berlaku disini adalah keseluruhan jumlah SNI yang telah ditetapkan BSN dikurangi dengan jumlah SNI yang telah dicabut.

Tahun 2020 target kinerja Indikator ini adalah Jumlah SNI yang diterapkan sebesar 2.650, atau sekitar ..... % dari jumlah 9.935 SNI.

Untuk menghitung jumlah SNI yang diterapkan, dilakukan penghitungan dari data ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, Lembaga inspeksi, data SPPT SNI yang ada di aplikasi bangbeni (bangbeni.bsn.go.id), lingkup Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) penunjukan, lingkup SNI peserta SNI Award 2020, dan kebijakan K/L yang menjadikan SNI sebagai acuan dalam membuat kebijakannya. Penjumlahan tersebut dikurangi dengan SNI yang sama untuk menghindari perhitungan ganda.

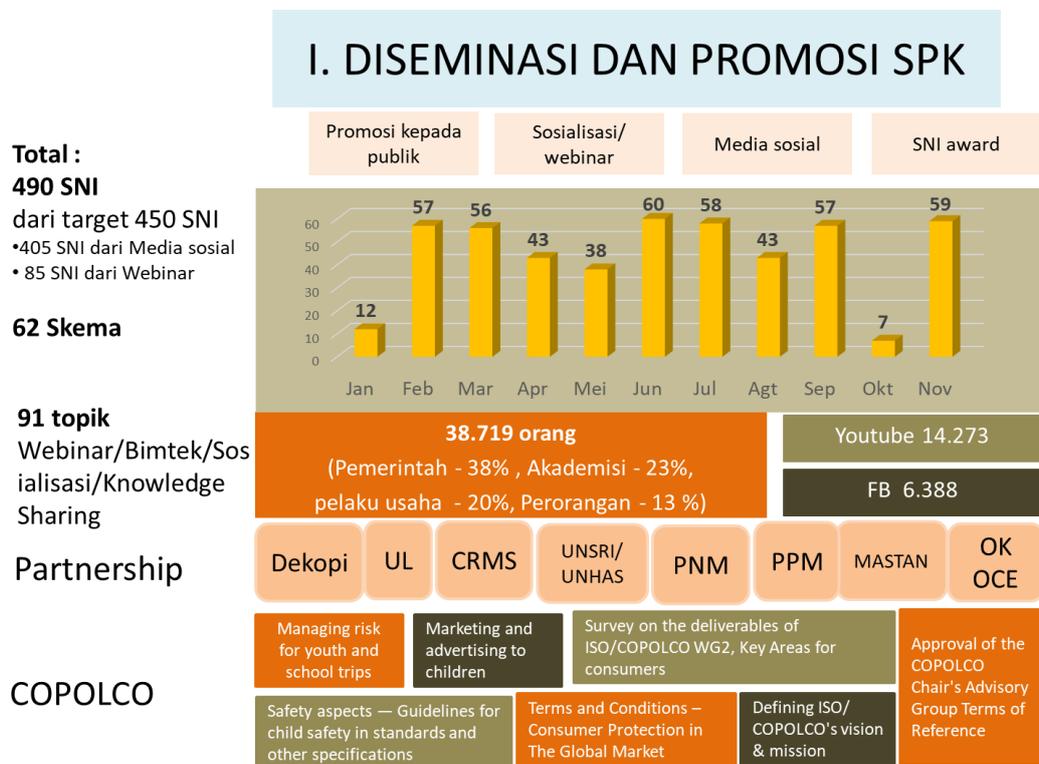
**Tabel III.3 Jumlah SNI yang diterapkan**

No	Data SNI	Jumlah SNI
1	SNI Lingkup LSPPro	1.785
2	SNI Lingkup LSPPro penunjukan	18
3	SNI lingkup Laboarorium	1.743
4	SNI Sistem Manajemen dan PK	28
5	SNI dari SPPT SNI aplikasi Bang Beni	249
6	SNI Award 2020	100
7	SNI dipakai kebijakan K/L	242
Jumlah Kotor		4.165
Jumlah Bersih (setelah dikurangi duplikasi)		3.175

Capaian kinerja tersebut melampaui dari target yang ditetapkan, yaitu tercapai 25% dari target 10% (Presentase SNI yang diterapkan). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja untuk indikator ini memenuhi target.

Keberhasilan pencapaian target ini merupakan hasil dari beberapa output yang dari subkegiatan yang dilakukan Direktorat Penguatan penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, antara lain dilakukannya diseminasi SNI kepada pelaku usaha, edukasi dan

peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya SNI, pemberian fasilitasi kepada pelaku usaha baik usaha mikro kecil, menengah industri besar dan organisasi, serta semakin bertambahnya lingkup lembaga penilaian kesesuaian yang memberikan layanan baik pengujian, sertifikasi, maupun inspeksi kepada pelaku usaha.

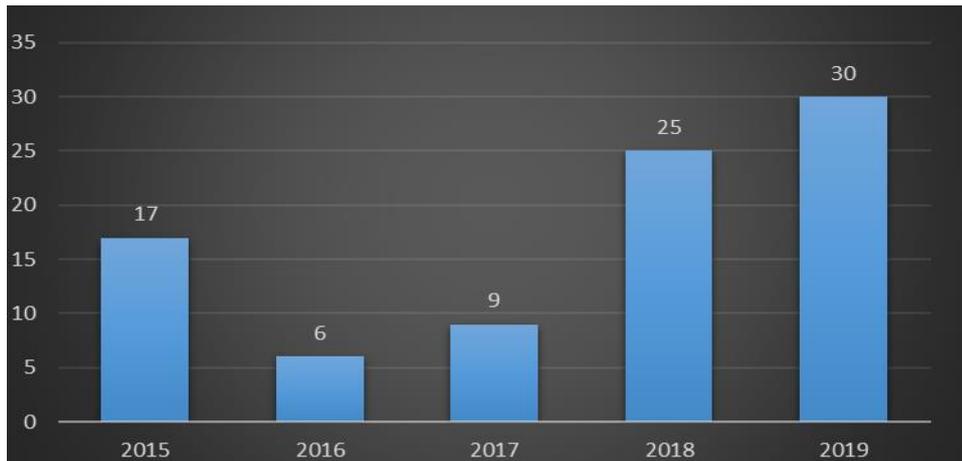


Capaian jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI mencapai 100 persen, dengan capaian 103 role model dari 80 pelaku usaha yang ditargetkan. Pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI dalam hal ini adalah pelaku usaha yang difasilitasi yang berhasil mendapatkan sertifikat SNI dan organisasi yang memperoleh penghargaan SNI Award.

Pada tahun 2020, dari 220 pelaku usaha yang diberikan pembinaan penerapan SNI, 30 UMKM diantaranya telah mendapat sertifikasi SNI dan HACCP, sedangkan organisasi yang mendapatkan sertifikasi SNI berjumlah 4 organisasi. Sedangkan pada tahun ini organisasi yang memperoleh penghargaan SNI Award berjumlah 69 organisasi. Jadi total pelaku usaha yang penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI berjumlah 103 pelaku usaha (organisasi). Hal ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 80 role model penerap SNI.

#### 1. Organisasi/Pelaku usaha yang difasilitasi dan memperoleh Sertifikat SNI

Berdasarkan gambar dibawah ini adalah jumlah role model penerap SNI setiap tahun yang khusus dari pelaku UMKM.



**Gambar III.2 Jumlah UMKM yang dibina dan memperoleh SNI setiap tahun dari 2015-2020**

Berdasarkan Gambar III.2 tersebut capaian role model UMKM penerap SNI dengan dibandingkan dengan penyediaan anggaran setiap tahun, membuktikan bahwa dalam proses pembinaan penerapan SNI agar lebih banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikasi perlu berkolaborasi dengan kementerian atau instansi lain. Pada tahun 2020, beberapa UMKM yang dilakukan pembinaan penerapan SNI mendapatkan fasilitasi biaya sertifikasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM (sebanyak 3 UMKM), PT Sucofindo (sebanyak 1 UMKM) dan dari program CSR BUMN (sebanyak 2 UMKM). Total role model UMKM penerap SNI sampai saat ini sebanyak 87 UMKM seperti dalam Gambar III.2 di bawah ini.



**Gambar III.3 Akumulasi Jumlah UMKM yang dibina dan memperoleh SNI tahun 2015-2020**

Sedangkan untuk organisasi yang menjadi role model penerap SNI dengan berhasil sertifikasi SNI di Tahun 2020 adalah :

1. Baristand Surabaya sertifikasi SNI ISO 37001
2. Pemkot Kupang sertifikasi SNI ISO 9001

3. Inspektorat Pemkab Serang sertifikasi SNI ISO
4. Universitas Jember integrasi sertifikasi SNI ISO 9001 dan SNI ISO 37001

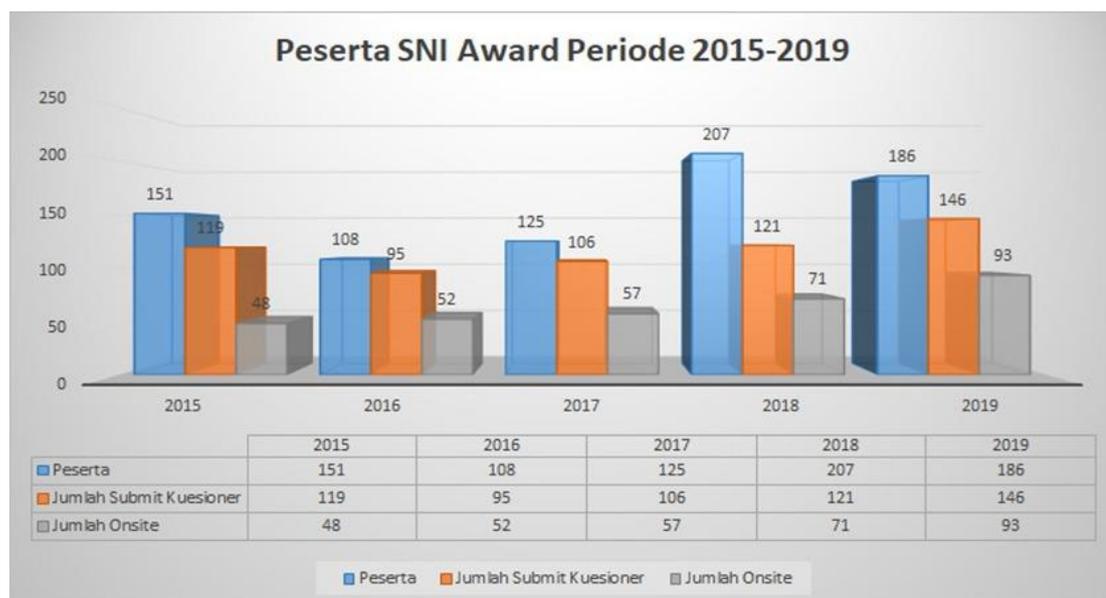
Sedangkan sisanya dalam proses pembinaan penerapan SNI.

Sedangkan untuk pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI yang merupakan penerima SNI Award perbandingan capaian tiap tahunnya sebagai berikut:

## 2. Organisasi yang memperoleh penghargaan SNI Award

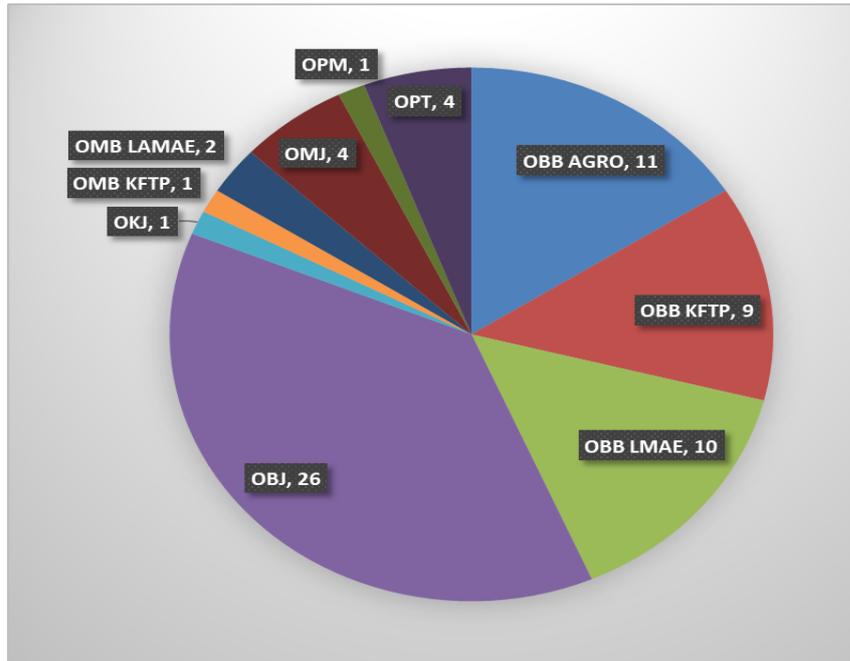
SNI Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah melalui BSN kepada perusahaan atau organisasi yang dinilai paling baik dan konsisten dalam menerapkan SNI. Tahun 2020 merupakan tahun ke-15 diselenggarakannya ajang penghargaan tersebut.

Peserta SNI Award yang mendaftar berdasarkan berkas yang diberikan sebanyak 146 organisasi. Setelah dilakukan *desk evaluation* ditetapkan 93 peserta yang lolos untuk dilakukan evaluasi lapangan (*site evaluation*).



**Gambar III.4 Perkembangan jumlah peserta SNI Award tahun 2015-2020**

Dari 93 peserta SNI Award yang dilakukan evaluasi lapangan. Berdasarkan keputusan Dewan Juri diputuskan 69 organisasi mendapatkan penghargaan SNI Award, dengan rincian 1 organisasi penerima penghargaan Grand Platinum, 3 organisasi penerima penghargaan Platinum, 15 organisasi penerima penghargaan Emas, 38 organisasi penerima penghargaan Perak dan 13 organisasi penerima penghargaan Perunggu.



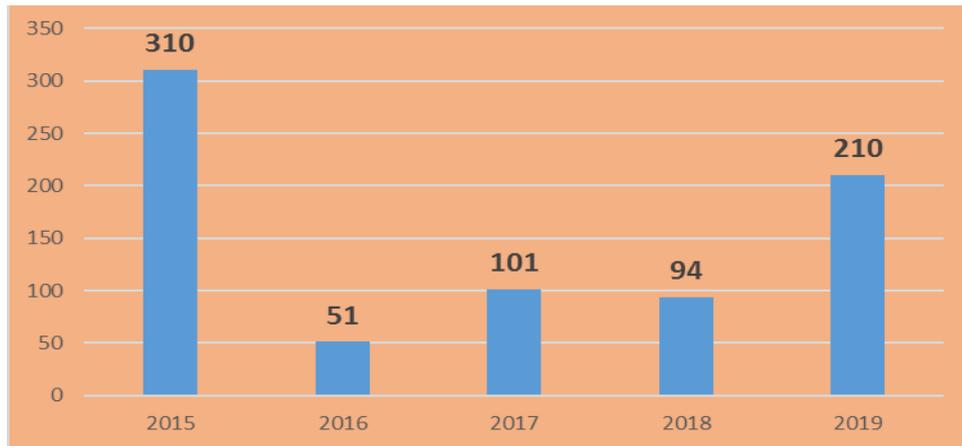
Gambar III.5 Penerima SNI Award tahun 2020 berdasarkan Kategori

### Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI

Sesuai dengan amanah Undang-undang No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 53, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lainnya, dan/ atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

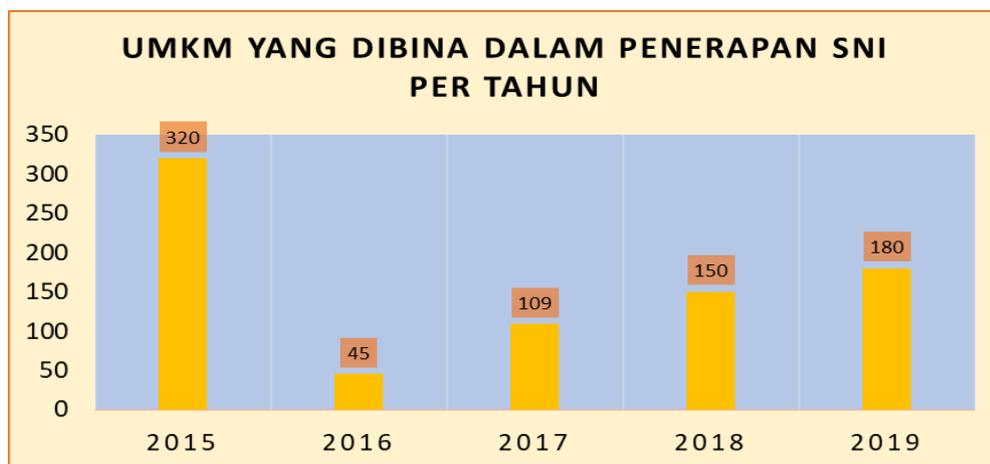
Pembinaan penerapan SNI terhadap penerapan ini dilakukan secara multiyear, artinya pembinaan penerapan SNI yang dicapai di tahun 2020 bisa merupakan hasil proses pembinaan dari tahun sebelumnya. Pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha/organisasi diharapkan tidak berhenti sampai proses sertifikasi tapi juga dibantu dalam mempromosikan produk yang sudah ber-SNI ataupun mempromosikan organisasi yang sudah dapat SNI dengan melakukan branding organisasi tersebut juga BSN selaku intittusi pembina.

Capaian indikator kinerja jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI tercapai 100 % (sebanyak 220 pelaku usaha) dari target yang ditetapkan sebanyak 150 pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud disini adalah pelaku UMKM, Industri dan juga organisasi yang dilakukan pembinaan penerapan SNI oleh BSN.



**Gambar III.8 Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam penerapan SNI tahun 2015-2020**

Pada tahun 2020, pembinaan penerapan SNI kepada pelaku UMKM sebanyak 180 UMKM, 21 industri besar dan 19 organisasi. Pencapaian ini lebih besar yang dilakukan di tahun 2018, dimana pelaku UMKM yang dibina dalam penerapan SNI hanya 150 dan organisasi yang dibina tahun 2018 hanya 8 organisasi/industri. Perbandingan jumlah pelaku UMKM yang dibina setiap tahunnya seperti dalam Gambar III.9 di bawah ini.



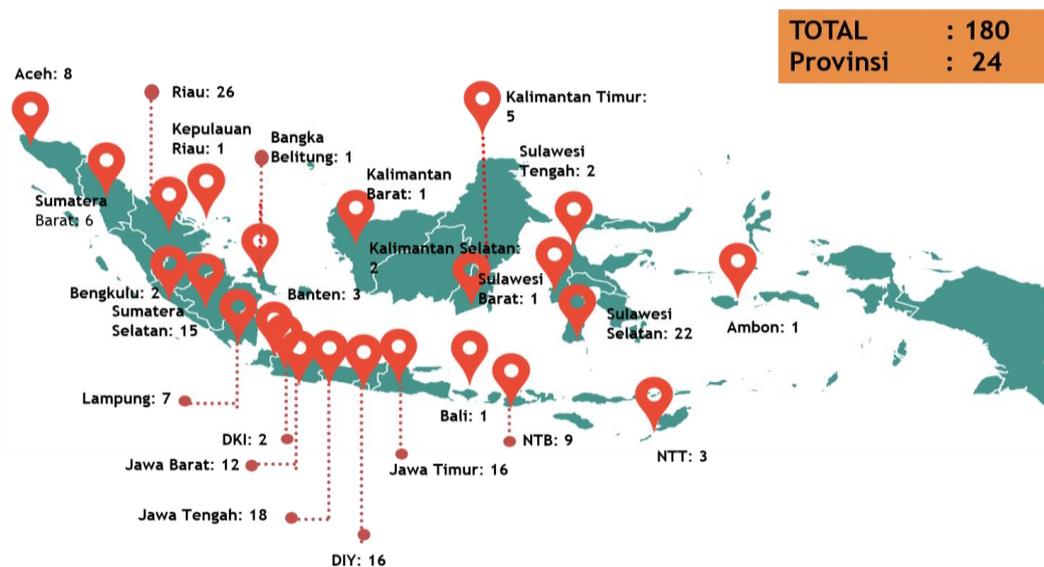
**Gambar III.9 Jumlah UMKM yang dibina dalam Penerapan SNI setiap tahun dari 2015-2020**

Dalam tahun yang berjalan, proses pembinaan kepada UMKM bisa merupakan kelanjutan dari pembinaan UMKM tahun sebelumnya. Sebagai contoh pembinaan 180 UMKM di tahun 2020 merupakan beberapa UMKM yang dibina tahun sebelumnya yang masih dalam tahapan proses pembinaan. Dengan demikian jumlah data UMKM secara kumulatif yang dilakukan pembinaan penerapan SNI sampai dengan tahun 2020 total adalah 707 UMKM seperti terlihat dalam Gambar III.10.



**Gambar III.10 Data kumulatif UMKM yang dbina dalam penerapan SNI tahun 2015-2020**

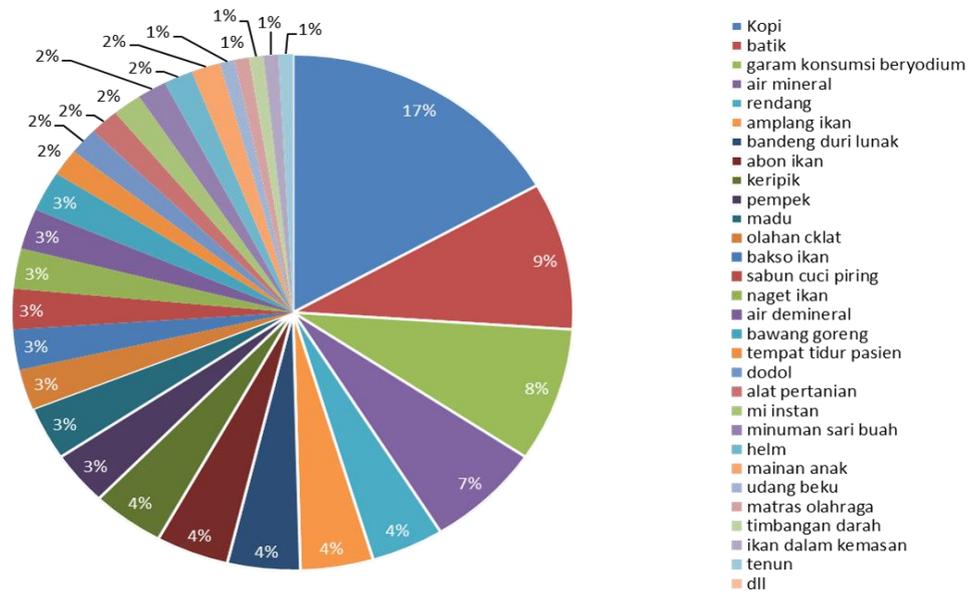
Sebaran pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha tahun 2020 mengalami penambahan, yang tahun 2018 hanya di 22 Provinsi tahun 2020 menjadi 24 propinsi (menambah 2 propinsi yaitu NAD dan Bali).



**Gambar III.11 Peta Sebaran pelaku usaha yang dibina dalam penerapan SNI selama tahun 2020**

Dari 180 UMKM yang dbina dalam penerapan SNI yang tersebar di 24 propinsi terdiri dari 90 jenis produk yang jenisnya sesuai dengan Gambar dibawah ini. Dari 90 jenis

produk, 46 adalah produk pangan dan 44 adalah produk non pangan dengan jenis produk yang mendominasi adalah kopi (17%) dan Batik (9%).



**Gambar III.12 Jenis produk yang dbina dalam penerapan SNI di tahun 2020**

Perkembangan jumlah pembinaan penerapan SNI kepada organisasi/industri setiap tahunnya seperti pada Gambar III.13.



**Gambar III.13 Jumlah Organisasi dan Industri yang dibina dalam penerapan SNI per tahun**

Pada tahun 2020 BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada organisasi sebanyak 19 organisasi dan 21 industri. Jumlah tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya 8 organisasi dan industri. Untuk fasilitasi kepada industri dan organisasi, BSN tidak memfasilitasi biaya sertifikasi seperti pada UMKM namun hanya pendampingan penyiapan sistem sampai siap untuk proses pendaftaran sertifikasi. SNI yang difokuskan untuk diterapkan kepada organisasi adalah SNI ISO 9001, SNI ISO 37001, SNI 8152, SNI Desa

Tanggung Bencana, SNI Pengelolaan Pariwisata Alam, SNI Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium, dan SNI ISO 21001.

### Jumlah SNI yang Diseminasikan

Indikator kinerja untuk mengukur upaya untuk peningkatan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi salah satunya adalah jumlah SNI yang didiseminasikan. Target dari sasaran ini adalah sebanyak 350 SNI yang didiseminasikan. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebanyak 361 SNI, melampaui 100%. Indikator kinerja ini dicapai melalui kegiatan Sosialisasi SNI dengan metode tatap muka dan media sosial, secara ringkas dapat dijelaskan pada Tabel III.5 berikut.

**Tabel III.5 Jumlah SNI yang didiseminasikan**

No	Metode Diseminasi	Jumlah SNI
1	Media promosi, seminar, sosialisasi	264
2	Fasilitasi pelaku usaha dan LPK	19
3	SNI Valuasi	48
4	Rangkaian acara Bulan Mutu Nasional	8
5	SNI Award	22
	Jumlah	361

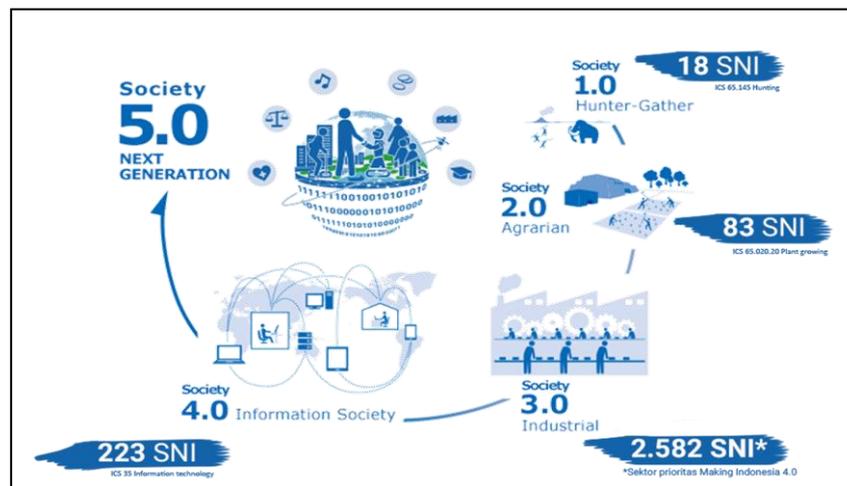
Gambaran kegiatan desiminasi yang dilakukan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### **1. Seminar Standardization in a living society 5.0**

Kegiatan ini di selenggarakan di Jakarta dan dihadiri oleh 174 peserta. Seminar ini mengangkat tema *Standardization in A Living Society 5.0*. Indonesia sudah harus menyiapkan diri untuk memasuki era industri 4.0 dan Society 5.0. Infrastruktur sudah disiapkan oleh Pemerintah antara lain Kemenkominfo dan BSN telah menyiapkan SNI yang diperlukan. SNI yang dikembangkan ada yang dikembangkan sendiri atau dari standar internasional ISO dan standar lain.



Gambar III.14 Pelaksanaan *Standardization in A Living Society 5.0*



Gambar III.15 Peta SNI terkait dengan *Society 5.0*

## 2. Sosialisasi SNI kepada *Womenpreneur*

Kegiatan ini di selenggarakan di Jakarta dan dihadiri oleh 29 peserta yang keseluruhannya adalah pelaku usaha 3 di antaranya kemudian dilanjutkan dengan pembinaan penerapan SNI.



**Gambar III.15 Peta SNI terkait dengan Society 5.0**

### **3. Sosialisasi SNI bersama dengan *stakeholder***

Kegiatan ini di selenggarakan di beberapa kota Jakarta, Bandung, Bekasi dan beberapa daerah di selatan Pulau Jawa dihadiri oleh berbagai macam kalangan. Kegiatan tersebut antara lain :

- a. Sosialisasi SNI kepada Pembina UKM Propinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Barat,
- b. Sosialisasi SNI Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan SNI terkait kepada masyarakat yang dilalui acara Ekspedisi Destana di sepanjang Pantai Selatan Jawa mulai dari Banyuwangi sampai Serang bekerja sama dengan BPNB,
- c. Sosialisasi SNI bekerja sama dengan HRD Forum Jababeka di Cikarang,
- d. Sosialisasi Pasar Rakyat kepada Pengelola Pasar Daerah tentang SNI 8152:2015 bekerja sama dengan YDP,
- e. Sosialisasi SNI di wilayah Kantor Layanan Teknis yaitu Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Bekasi, dan Makassar,
- f. Sosialisasi tentang Keselamatan instalasi listrik bekerja sama dengan APKABEL,
- g. Sosialisasi SNI dalam rangka Bulan Mutu Nasional di Semarang.



**Gambar III.16 Seminar Nasional dan Bulan Mutu Nasional 2020 di Semarang**



**Gambar III.17 Sosialisasi SNI pada Temu Pembina UKM Juara**



**Gambar III.18 Sosialisasi SNI Pada Ekspedisi Destana**



**Gambar III.19 Sosialisasi SNI pada HRD Forum Jababeka**



**Gambar III.20 Sosialisasi Pasar Rakyat kepada Pengelola Pasar Daerah tentang SNI 8152:2015**

#### **4. Promosi SNI Tematik kepada anak sekolah**

Promosi SNI kepada anak dilaksanakan bersamaan dengan program Destana atau Desa Tangguh Bencana, selain melakukan promosi SNI Desa Tangguh Bencana juga dilakukan pemulihan trauma dengan cara mengenalkan SNI dengan berbagai macam permainan kepada anak-anak. Juga Promosi SNI kepada anak bekerjasama dengan Darma Wanita BSN juga dilaksanakan di Jakarta yaitu di Panti Asuhan Yayasan Az – Zahra.



**Gambar III.21 Promosi SNI Tematik pada anak sekolah**



**Gambar III.22 Promosi SNI Tematik pada anak panti asuhan**

## **5. Promosi SPK melalui Media Sosial**

BSN secara resmi mengelola media sosial di Facebook, Instagram, dan Twitter, disamping website dan e-mail. Berikut adalah beberapa contoh materi promosi yang dipublikasikan di media sosial BSN.



**BSN** BADAN STANDARISASI NASIONAL

## SNI 8098:2017

### TEKSTIL - KERUDUNG

Berisi persyaratan mutu kerudung (kain yang digunakan untuk penutup kepala perempuan), baik berupa kain rajut maupun kain tenun dan bermacam jenis serat.

**Pengujian kerudung :**  
Uji tarik, sobek, jebol, luntur, fisik dan bahan kimia berbahaya.

No.	Jenis uji	Satuan	Persyaratan	Keterangan
1	Kekuatan tarik <sup>1)</sup>	N (kg)	800,0	Minimum
2	Kekuatan sobek <sup>1)</sup>	N (kg)	6.710,7	Minimum
3	Kekuatan poci <sup>1)</sup>	kg/cm	3,5	Minimum
4	Kemampakan kain setelah pencucian berulang <sup>2)</sup>	-	SA 3,5	Minimum
5	Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan <sup>1)</sup>	-	-	-
5.1	Kain tenun - Arah lusi - Arah pakan	-	2% 2%	+/-, Maksimum +/-, Maksimum
5.2	Kain rajut - Wale - Course	-	5% 5%	+/-, Maksimum +/-, Maksimum
6	Ketahanan luntur warna terhadap:	Skala	-	-
6.1	Pencucian - Perubahan warna <sup>1)</sup> - Penodaan <sup>1)</sup>	-	4 3-4	Minimum Minimum
6.2	Suci kering - Perubahan warna <sup>1)</sup> - Penodaan <sup>1)</sup>	-	5 3-4	Minimum Minimum

Syarat mutu kerudung  
 ➔ **HUBUNGI :** dokinfo@bsn.go.id  
 untuk mendapatkan dokumen SNI lengkap nya  
 Komite Teknis 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil

BSN | Badan Standardisasi Nasional | www.bsn.go.id

**BSN** BADAN STANDARISASI NASIONAL

# Selamat

MITRA BSN  
 kepada PT. PABRIK CAT TUNGGAL DJAJA INDAH  
 MENDAPKANKAN SERTIFIKAT SNI CAT TEMBOK EMULSI

SNI 3564:2014 CAT TEMBOK EMULSI  
 CAT TEMBOK PARAGON

BSN | Badan Standardisasi Nasional | www.bsn.go.id

Gambar III.23 Promosi SPK Melalui Media Sosial

### Jumlah LPK yang berhasil difasilitasi dalam mendukung penerapan SNI dan siap diakreditasi KAN

LPK merupakan salah satu instrumen penting dalam penerapan SNI, yang dapat memberikan keyakinan bahwa suatu barang, jasa, proses, sistem, dan personel telah memenuhi standar atau tidak. Karena peran penting tersebut, LPK harus diyakini kompetensinya sesuai dengan kaidah yang berlaku di Internasional.

Capaian indikator kinerja Jumlah LPK yang berhasil difasilitasi dalam mendukung penerapan SNI dan siap diakreditasi tercapai 60 % (sebanyak 6 LPK) dari target yang

ditetapkan sebanyak 10 LPK. Daftar LPK yang telah siap untuk diakreditasi sebagaimana Tabel III.6.

**Tabel III.6 LPK yang memenuhi kelayakan dan kesiapan pengajuan akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional**

No.	Nama LPK	Ruang Lingkup Akreditasi	Keterangan
1.	Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Padang	Laboratorium Penguji	Pengajuan ruang lingkup baru
2.	PT. Saka Tunggal Mandiri Jaya	Laboratorium Kalibrasi	Pengajuan ruang lingkup baru
3.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar-Sukabumi	Lembaga Sertifikasi IndoGAP	Penambahan ruang lingkup
4.	PT. Sertifikasi Cohespa Indonesia	Lembaga Sertifikasi Pelaksana Penyelenggara Ibadah Umroh	Penambahan ruang lingkup
5.	Balai Riset Standardisasi Padang	Lembaga Sertifikasi Produk	Penambahan ruang lingkup
6.	PT. Global Solusi Bioresiko	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Bioresiko Laboratorium	Pengajuan ruang lingkup baru

Komitmen dan dukungan seluruh sumber daya manusia dari level pimpinan sampai dengan staf LPK dalam pelaksanaan fasilitasi/bimbingan teknis sangat menentukan keberhasilan dan kesiapan suatu LPK untuk diakreditasi. Faktor penting tidak tercapainya target yang ditetapkan adalah lemahnya komitmen tersebut. Kedepan perbaikan yang dapat dilakukan meliputi:

- a. perlu ditetapkan jadwal yang ketat disertai dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi bimbingan secara rinci, dimana hal ini akan dituangkan dalam dokumen surat perjanjian kerja atau komitmen bersama;
- b. perlu ditetapkan *Personel In Charge* (PIC) yang bertanggung jawab penuh melakukan pemantauan dan perkembangan tahapan fasilitasi/bimbingan teknis yang telah disepakati bersama.

### 1. Fasilitasi Bimbingan Teknis LPK

Selama tahun 2020, fasilitasi bimbingan teknis untuk lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium telah dilakukan terhadap 130 LPK potensial. LPK potensial yang difasilitasi selama tahun 2020 masih didominasi oleh LPK yang berada di Wilayah Barat Indonesia, sedangkan untuk wilayah tengah dan timur Indonesia masih sedikit.



**Gambar III.24 Bimbingan Teknis LPK**

Selain fasilitas bimbingan teknis yang dilakukan di tempat LPK pemohon, guna mengoptimalkan dukungan LPK terhadap produk unggulan daerah, dilakukan “Refreshment workshop SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17065:2012” di 5 (lima) Kantor Layanan Teknis BSN, yaitu : di Pekanbaru – Riau, Palembang Sulawesi Selatan, Bekasi – Jawa Barat, Surabaya – Jawa Timur serta Makassar – Sulawesi Selatan. Adapun jumlah LPK potensial yang mengikuti pada kegiatan tersebut adalah sebagaimana berikut :

**Tabel III.7 Kepesertaan Refreshment Workshop dari 5 KLT BSN**

No.	Lokasi Penyelenggaraan	Jumlah Peserta Workshop SNI ISO/IEC 17025	Jumlah Peserta Workshop SNI ISO/IEC 17065:2012
1.	Kantor Layanan Teknis Riau	10 organisasi	11 organisasi
2.	Kantor Layanan Teknis Palembang	12 organisasi	6 organisasi
3.	Kantor Layanan Teknis Bekasi	12 organisasi	8 organisasi
4.	Kantor Layanan Teknis Surabaya	17 organisasi	10 organisasi
5.	Kantor Layanan Teknis Makassar	10 organisasi	4 organisasi
<b>JUMLAH</b>		<b>61 organisasi</b>	<b>39 organisasi</b>

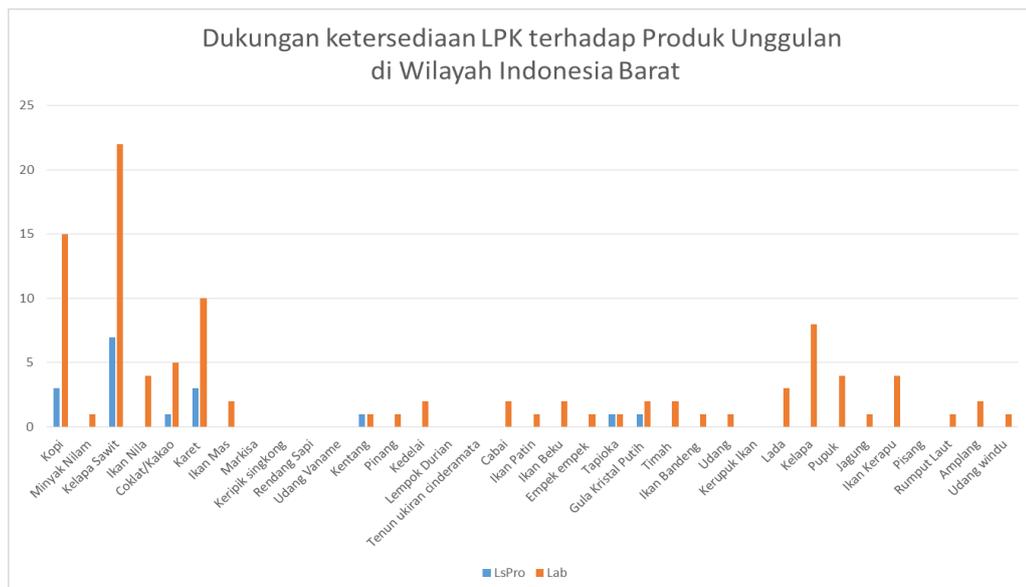


**Gambar III.25 Bimbingan Teknis LPK (SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17065:2012) di Kantor Layanan Teknis BSN**

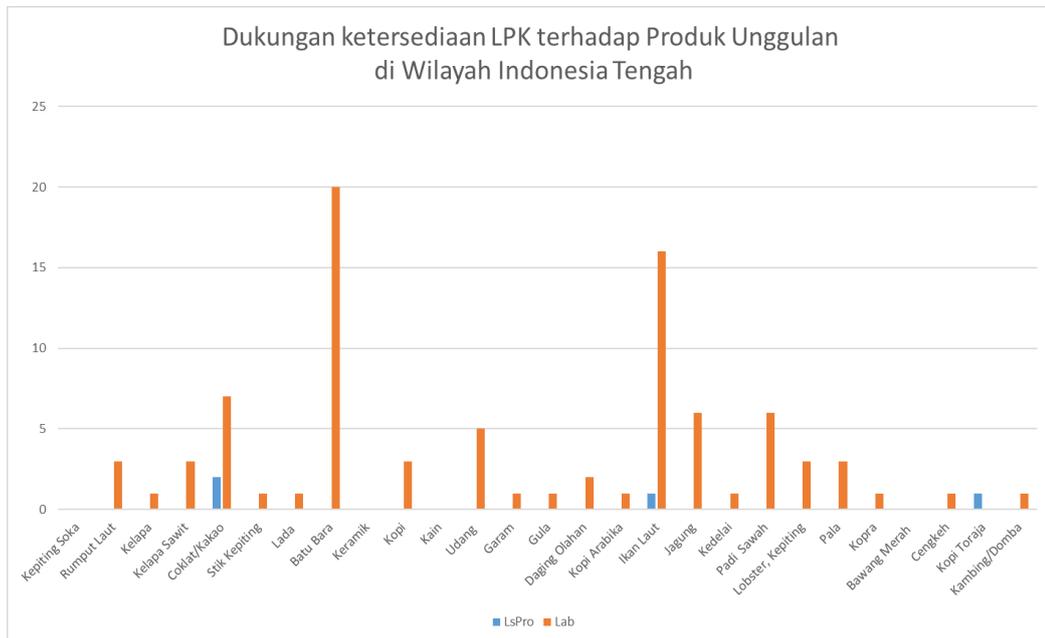
Antusias dan animo LPK mengikuti kegiatan fasilitasi sangat baik, guna meningkatkan infrastruktur mutu dalam mendukung penilaian kesesuaian produk unggulan daerah. Penyelenggaraan fasilitasi yang dilakukan oleh BSN di Kantor Layanan Teknis diharapkan mampu meningkatkan kuantitas LPK potensial.

## 2. Pemetaan LPK

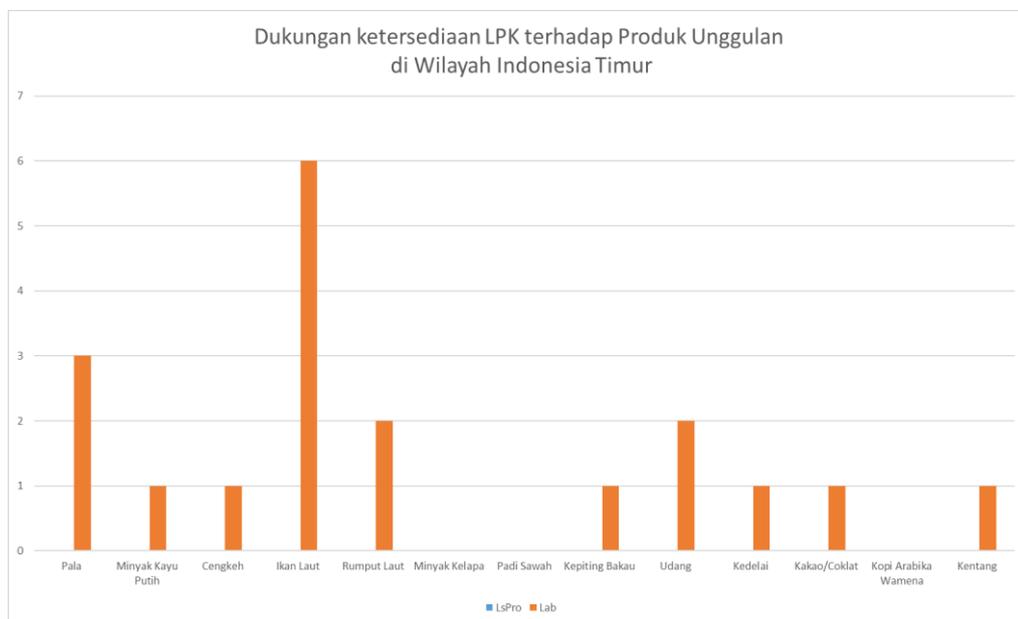
Penyusunan peta daya dukung LPK (LSPro dan Laboratorium Pengujian) guna mendukung produk unggulan daerah di 34 provinsi di Indonesia dapat disajikan Gambar berikut.



**Gambar III.26 Hasil Pemetaan LPK di Wilayah Indonesia Bagian Barat**



**Gambar III.27 Hasil Pemetaan LPK di Wilayah Indonesia Bagian Tengah**



**Gambar III.28 Hasil Pemetaan LPK di Wilayah Indonesia Bagian Timur**

Dari hasil pemetaan di atas, serta melihat sebaran LPK di ketiga wilayah Indonesia, tampak bahwa mayoritas keberadaan LPK masih berdomisili di wilayah Indonesia bagian barat, sementara di Indonesia bagian tengah dan timur masih tampak minim. Tentunya hal ini perlu mendapat perhatian depan, terlebih produk unggulan daerah di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur memerlukan infrastruktur penilaian kesesuaian guna memperluas penerapan produk unggulan daerah ber-SNI.

### **3. Penyusunan Pedoman BSN (PBSN) No. 20 Tahun 2020 tentang Pengembangan LPK**

Guna memberikan kerangka operasional dalam pelaksanaan fasilitasi LPK yang efektif dan efisien, telah disusun Pedoman BSN No. 20 Tahun 2020 tentang Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka fasilitasi sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi LPK agar dapat : (1) mendukung pengembangan produk unggulan daerah; (2) memperluas penerapan SPK, dan (3) mendukung Kebijakan Nasional.

## **III.2 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA**

### **Pengelolaan Sekretariat *Joint Sectoral Committee on electrical and electronic equipment (JSC EEE)***

JSC EEE merupakan sebuah Komite Sektoral Bersama terkait dengan peralatan listrik dan elektronik di tingkat ASEAN yang mengurus keberterimaan system penilaian kesesuaian. Dalam Komite ini, BSN berperan dalam melakukan pendaftaran LPK yang akan didaftar sebagai LPK yang diakui di ASEAN.

LPK yang telah masuk *listed* LPK di negara ASEAN, maka : (1) Hasil uji/sertifikasi LPK yang terdaftar diakui negara ASEAN; (2) Pelaku usaha Indonesia yang akan mengekspor produk ke negara anggota ASEAN, cukup diuji/disertifikasi oleh LPK Indonesia yang telah *listed* di negara anggota ASEAN, tanpa perlu diuji/disertifikasi lagi di negara tujuan. Hal ini tentu saja akan menghapuskan adanya pengujian berulang di negara ASEAN, serta memperlancar transaksi dan proses perdagangan tentunya.

Sampai saat ini telah melakukan memfasilitasi pendaftaran LPK yang ingin masuk dalam LPK terdaftar di ASEAN. Adapun rincian LPK Indonesia yang terdaftar di ASEAN sebagaimana Tabel III.8 berikut.

**Tabel III.8 LPK Indonesia yang terdaftar ASEAN**

NO	NAMA LPK	JENIS LPK	TERDAFTAR SEJAK	MASA BERLAKU
1	PT Hartono Istana Teknologi	Testing Laboratory	6 July 2006	6 Dec 2017 – 5 Dec 2020
2	Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB)	Testing Laboratory	30 Jan 2019	30 Jan 2019 – 30 Sept 2020
3	TUV Rheinland Indonesia	Certification Body	11 Sept 2017	11 Sept 2017 – 10 Sept 2020
4	TUV Nord Indonesia	Certification Body	12 Dec 2015	19 Dec 2016 - 6 Dec 2019
5	Sucofindo International Certification Services (SICS)	Certification Body	7 Dec 2015	19 Jan 2017 - 15 Oct 2020
6	PT Sucofindo Laboratory	Testing Laboratory	22 Nov 2016	22 Nov 2016 - 18 Augs 2019
7	PT. Qualis Indonesia	Testing Laboratory	29 Sept 2017	29 Sept 2017 – 28 Sept 2020
8	PT UL International Indonesia	Testing Laboratory	27 Oct 2017	27 Oct 2017 – 26 Oct 2020

### III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran TA 2019 Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebesar Rp. 11.821.577.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.608.394.931 atau 98,20 %.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.9 Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 2020**

IKK/ Kegiatan /Output	KINERJA			ANGGARAN (per 22 Desember 2020)		
	Target	Realisasi	%	Pagu seth covid	Realisasi	% Capaian
1. Jumlah produk yang memenuhi SNI						
	20.000 Produk	23.530 produk	100			
2. Jumlah SNI yang diterapkan						
	2650 SNI	3.175 SNI	100			
3. DISEMINASI & PROMOSI SPK						
	450 SPK	552 SPK	100	1.494.020.000	1.489.720.947	100
4. BIMBINGAN TEKNIS PELAKU USAHA DAN ORGANISASI						
	220 Pelaku Usaha	325 Pelaku usaha	100	1.006.700.000	995.572.077	99
5. BIMBINGAN TEKNIS LPK						
	25 LPK	30 LPK	100	372.000.000	371.344.800	100
6. PELAYANAN SPK DI KLT						
	1250 SPK	13.445 SPK	100	2.517.160.000	2.487.653.642	98.80
					<b>Total</b>	<b>99,15</b>

*Dalam 1000 rupiah*

Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Kedepujian Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional pada Tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama setelah dilakukannya re-organisasi BSN dalam rangka mendukung implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2020.

Perjanjian Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 telah menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Terlaksananya kegiatan di Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sangat mendukung pelaksanaan tugas Kedepujian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Beberapa kinerja yang masih perlu ditingkatkan antara lain : 1) Peningkatan efektivitas pelaksanaan standar dan penilaian kesesuaian, dan 2) Peningkatan kinerja fasilitasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian. Untuk pelaksanaan fasilitasi LPK kedepan yang lebih baik maka :

- a. perlu ditetapkan jadwal yang ketat disertai dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi bimbingan secara rinci, dimana hal ini akan dituangkan dalam dokumen surat perjanjian kerja atau komitmen bersama;
- b. perlu ditetapkan *Personel In Charge* (PIC) yang bertanggung jawab penuh melakukan pemantauan dan perkembangan tahapan fasilitasi/bimbingan teknis yang telah disepakati bersama.

Terhadap indikator kinerja yang belum memenuhi target ini, akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian di tahun-tahun berikutnya. Kiranya Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 ini dapat menggambarkan capaian kinerja dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Direktorat di masa mendatang.

ooOOoo

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### L.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

 **BADAN  
STANDARDISASI  
NASIONAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DIREKTORAT Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI	1 Jumlah Produk yang memenuhi SNI	20.000 Produk
2 Diterapkannya SNI Sesuai ketentuan	2 Jumlah SNI yang diterapkan (akumulatif)	2.650 SNI
3 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	3 Persentase realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	≥97 %

**Kegiatan** **Anggaran (Rp.)**

1 Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 10.200.000.000

Pihak Kedua Jakarta, 16 Desember 2019

Zakiyah Heru Suseno

## L.2. DAFTAR PELAKU USAHA MIKRO KECIL YANG DIFASILITASI

Resep Ibu	Bumbu Kacang	Resep ibu	SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP	Jl. Medokan Asri Barat X/N-14, Rungkut Surabaya Jawa Timur
Kelompok Tani Perikanan Dangga Sia	Garam konsumsi beriodium	Dangga Sia	SNI 3556:2016 Garam konsumsi beriodium	Desa Darussalam Kec. Bolo Kab. Bima, NTB
CV Internusa Djaya Permata	Mainan Anak	Kamalla	SNI ISO 8124- 1:2010; SNI ISO 8124- 2:2010; SNI ISO 8124- 3:2010; EN71-5; SNI 7617:2010	Pabrik : Ruko Shopping Street 09 No.11 , Citra Indah City, Singajaya, Jonggol, Bogor Kantor: Gedung WTC Mangga Dua Lt. LG Blok B No. 99 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara
PT Sinar Bogor Qua	Air Mineral	SBQUA	SNI 3553:2015 AMDK	Desa Gunung Meraksa Baru Kab. Empat Lawang Sumatera Selatan
UD Valmay Mie	Mi Instan	Alamie	SNI 3551:2012 Mi Instan	Jl. Werkudoro Kolojoyo No.57 GK I Kel Demangan, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta 55221
UKM Khansa Snack	Abon Ikan	Khansa	SNI 7690.1:2013 Abon ikan - Bagian 1: Spesifikasi	Mancasan Kleben Gg Abimanyu No.44C Sleman Yogyakarta
PT Kampung COKLAT Blitar	Coklat	Kampung Cokelat	SNI 7934:2014 Cokelat dan produk-produk cokelat	Jl. Banteng BI Orok No. 18 PI Osorejo Blitar, Jawa Timur
UKM ANA	Sirup markisa anai	Anai	SNI 3719:2014 Minuman sari buah	JL P erintis Kemerdekaan Komp Wassabe Blok B No. 22 Kel. Tamalanrea Kota Makassar
Cottoni Panrita	Kembang Gula Lunak - Jelly	Lopi	SNI 3547.2:2008 Kembang gula - Bagian 2: Lunak	Jl. Menara No.78 Kelurahan Bintaroe Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan

Maisya	Yogurt	Maisya Yogurt	SNI 2981:2009 Yogurt	Jl. Sumbawa III/26 Kelurahan Gedang Anak, Ungaran
UD Milhy Jaya	Garam Konsumsi Beryodium	Milhy	SNI 3556:2010 Garam konsumsi beriyodium	Jl. Cot Iju Km 5 Desa Tanoh Anoe, Kec. Jangka, Kab. Bireun, Prov. Aceh
PT Jericho Komposit Indonesia	Helm	Jericho	SNI 1811:2007 Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua	Jl. Kutisari Selatan I No. 12 Surabaya
PT Shima Prima Utama	Tempat tidur pasien	SHIMA	SNI IEC 60601-2- 52:2014 Peralatan elektromedik - Bagian 2-52: Persyaratan khusus keselamatan dasar dan kinerja esensial tempat tidur pasien (IEC 60601-2-52:2009, IDT)	Jl. Sebatok Jl. Taman Kenten No.76A, Duku, Ilir Timur II, Palembang City, South Sumatra 30163
Popatoy Warehouse	Mainan anak	Popatoy warehouse	SNI ISO 8124- 1:2010 ; SNI ISO 8124- 2:2010; SNI ISO 8124- 3:2010	Jl. Bantaran Gg 5f, No 41C, Kel: Tulusrejo, Kec: Lowokwaru Malang
Magic Craft	Mainan Anak	Magic craft	SNI ISO 8124- 1:2010 ; SNI ISO 8124- 2:2010; SNI ISO 8124- 3:2010	Komplek Griya maju blok H-2 kel. Sako baru kota palembang - Sumatera selatan
UD Puti Buana	Rendang Daging Sapi	Puti Buana	SNI 7474:2009 Rendang daging sapi	Jl. Pasir Putih No. 1-2 Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, Riau Jl. Jend Sudirman No. 11E-F Kota Pekanbaru, Riau
Koperasi Sentra rendang Payo	Rendang Daging Sapi	Ikosero	SNI 7474:2009 Rendang daging sapi	Jl Puti, Kel. Tigo Koto diate, Kec payakumbuh utara, kota payakumbuh, sumatera barat
Usaha Baju Bayi Christina Lucillawati	Pakaian bayi	NANIA	SNI 7617:2013/Amd 1:2014 (Tekstil- Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida, dan kadar logam	Jl. Terusan Ikan Paus I /23 Kota Malang Jawa Timur

			terekstraksi pada kain	
Koperasi Koppas Utama	Garam konsumsi beryodium	Garamta dan Kapas	SNI 3556:2016 Garam konsumsi beriodium	Arungkeke Kab Jeneoponto Sulawesi Selatan
PT. Kuliner ika itahi muna ngahiji	Kopi bubuk	Kopi para raja	SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk	jl prof dr abdurahman basalama no 99 kota makassar sulawesi selatan
PT Cita Rasa Palembang	Pempek ikan rebus beku	Pempek CRP	SNI 7661.1:2013 Pempek ikan rebus beku - Bagian 1: Spesifikasi	Jl. Tunas Harapan Lr. Mawar Kec. Sako Kelurahan Sukamaju Kota Palembang Sumatera Selatan
CV Tirta Dewi Kuningan	Minuman Serbuk Jahe Kopi dan Jahe Merah	Tirta Dewi TDK	SNI 01-4320-1996 Serbuk minuman tradisional	Sukamulya No.9 RT 001/RW 001 Kec. Garwangi Kab. Kuningan Jawa Barat
UD. Berkah adi putra	Naget ikan	My Ikan	SNI 7758:2013 Naget Ikan	RT. 03 RW 02 DSN Pundensari Ds Jeblog, Kec. Talun Kab blitar Jawa Timur
Rendang Uni Tutie	Rendang	Uni Tutie	SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP	Grand Depok Residence Kav 109 Tanah Baru Beji Depok, Jawa Barat
UKM Abon Jaya Mandiri	Abon ikan	AJM Food & Snack	SNI 7690.1:2013 Abon ikan - Bagian 1: Spesifikasi	Jalan Kapal Pinisi 7 RT.37 No.22 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur
PT Kreuz Bike Indonesia	sepeda	Kreuz	SNI 1049:2008 Sepeda - Syarat Keselamatan	Jl. Batik Jonas No.6 Kel. Sukaluyu Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung
Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret	Air Mineral	Smart Wasser	SNI 3553:2015 AMDK	Jl. Ir sutami No 36A Ketingan Surakarta 57126
Mega Arta Garment	Pakaian bayi	Fuku Sawa	SNI 7617:2013/Amd 1:2014 (Tekstil-Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida, dan kadar logam terekstraksi pada kain	Raya wisma lidah kulon A9, Kel. Lidah Kulon. Kecamatan Lakarsantri kota surabaya jawa timur

Batik Erna Surodinawan	batik tulis	Batik Erna Surodinawan	SNI 8302:2016 batik tulis	jl. Raya surodinawan no 57 mojkerto kota mojkerto jawa timur
CV Indowash	Insinerator	Sintawaka	SNI 8423:2017	Jl. Cisirung no 25 Kel. Pasawahan, Kec dayeuhkolot kab. Bandung - jawa barat
CV Aroma Food	Abon ikan	Aroma Food	SNI 7690.1:2013 Abon ikan - Bagian 1: Spesifikasi	Jl. Cendana No. 55 Dusun Silva Lambaroeh Ulee Pata Kec. Aya Kota Banda Aceh
PT Kilang Nabati Terpadu	minyak goreng sawit	Multi Mas	SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit	Jl. Sultan Abdullah RT 005 RW 003 Kel. Tallo Kec. Tallo Makassar
Baby Fynsass	Pakaian bayi	Baby Fynsass	SNI 7617:2013/Amd 1:2014 (Tekstil- Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida, dan kadar logam terekstraksi pada kain	Jl. Cibatu Raya No. 49 B Kel. Antapani Kec. Antapani Bandung Jawa Barat
Smart Baby	Pakaian bayi	Intan Baby	SNI 7617:2013/Amd 1:2014 (Tekstil- Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida, dan kadar logam terekstraksi pada kain	Kp. Sangkan RT 002 RW 008 Kel Ibun Kec. Ibun Kab. Bandung Jawa Barat
UKM Sido Mulyo	Amplang Ikan	Barokah Pak Suratmin	SNI 7762:2013 Amplang Ikan	Jl. Kapal Selam RT 23 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Bontang Prov. Kalimantan Timur

### L.3. DAFTAR LABORATORIUM YANG DIFASILITASI

No	Nama LPK	Standar	Skema/ Ruang Lingkup	Alamat
1	BPAP Takalar	SNI ISO/ IEC 17065 : 2012	IndoGap - CBIB	Balai Budidaya Air Payau Takalar Sulawesi Selatan Desa Mappakalompo Kec. Galesong Kab. Takalar
2	UPT PPSMB PALU	SNI ISO/ IEC 17065 : 2012	Bawang Goreng	Jl RA Kartini No.43 Palu Sulawesi Tengah

3	LPPT UGM	SNI ISO/IEC 17065:2012	Garam, Air Minum, Alat dan Mesin Pertanian serta Alat Kesehatan	Jl Kaliurang Km 4 Sekip Utara, Depok Slema Yogyakarta
4	BPSMB Gorontalo	SNI ISO/IEC 17065:2012	Sosoh Beras, AMDK	Jl Tinaloga No.4 Desa Toto Utara Kec Tilongkabila Bone Balango Gorontalo
5	UNS	SNI ISO/ IEC 17065 : 2012	RL: AMDK	Jl. Ir. Sutami No.36 A, Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
7	PT Bio Sciquest	SNI ISO/IEC 17021-1:2015	Biosafety Laboratory Level	Kedoya Elok Plaza DD 74 Jalan Panjang Kedoya Selatan
9	BPSMB JAMBI	SNI ISO 17065	SIR, AMDK, Kopi Instan dan Biji Kopi Minyak Goreng (sawit/kelapa)	Jalan letjend Suprpto No.29 Telanaipura Kota Jambi

10	BPSMB Prov Jabar	SNI ISO 17065	Komoditi : Kopi, Beras, Garam dapur, The, Coklat.	Jalan Raya Cinunuk No. 204 Kab Bandug Jawa Barat

#### L.4. DAFTAR LS YANG DILAKUKAN FASILITASI

No	Nama LPK	Provinsi	Jenis LPK	Status Terakhir Bimtek	Kesiapan Akreditasi
1	Balai Budidaya Air Payau Takalar	Sulawesi Selatan	IndoGap	Penyusunan Dokumen	Nopember 2020
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Jawa Barat	IndoGap	Pra Audit dan Kelayakan	Juni 2020
3	Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)	Jawa Tengah	LSPro	Penyusunan Dokumen	Nopember 2020
4	Baristand Padang	Sumatera Barat	LSPro	Penyusunan Dokumen	Tahun 2021 (saat ini mendapatkan penunjukan LSPro)
5	PT Sertifikasi Cohespa Indonesia	Jawa Timur	PPIU	Pra Audit dan Kelayakan	Desember 2019
6	UPT PPSMB Palu	Sulawesi Tengah	LSPro	Penyusunan Dokumen	Nopember 2020
7	LS ICSM Indonesia	DKI Jakarta	LS UP	Pelatihan Audit Internal	Sudah terakreditasi
8	PT Bio SciQuest	DKI Jakarta	LS SMBL	Pemahaman	Desember 2020
9	PT Sertifikasi Wisata Utama	Jawa Tengah	LS UP	Pemahaman	Sudah terakreditasi
10	UPTD Cirebon	Jawa Barat	LS Pro	Pemahaman	Bimtek bukan untuk kesiapan akreditasi
11	PT Global Solusi Biorisiko	Jawa Barat	LS SMBL	Pemahaman	Bimtek bukan untuk kesiapan akreditasi
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Samarinda	Kalimantan Timur	LS Pro	Pemahaman	Bimtek bukan untuk kesiapan akreditasi
13	STIA LAN Makassar	Sulawesi Selatan	LSP	Pemahaman	Bimtek bukan untuk kesiapan akreditasi
14	IRQA	Jawa Barat	PPIU	Pemahaman	Bimtek bukan untuk kesiapan akreditasi